BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak merdeka, Indonesia telah berkomitmen untuk melindungi anak. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28 B ayat (2), menyebutkan bahwa perlindungan anak merupakan jaminan konstitusional yang jelas. Anak adalah cita-cita bangsa dan harapan keberhasilan cita-cita suatu bangsa dan negara. Anak adalah makhluk sosial sekaligus makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa, dan sejak dikandung hingga dilahirkan. Mereka berhak untuk hidup, mandiri, dan dilindungi, baik perlindungan itu berasal dari orang tua, masyarakat, maupun lingkungan bangsa dan negara. Pada saat seorang anak lahir, hak untuk hidup dan kemerdekaan merupakan kebebasan fundamental yang harus dijaga dan ditingkatkan bukannya dihapuskan atau dihilangkan.¹

Menurut data empiris dari berbagai kasus perdagangan manusia, perempuan dan anak-anak adalah demografi korban yang paling umum. Bentuk eksploitasi lain, seperti prostitusi atau jenis eksploitasi seksual lainnya, juga digunakan untuk memperdagangkan korban. Perbuatan merekrut, mengangkut, memindahkan, menyembunyikan, atau menerima seseorang untuk tujuan menjebak, menundukkan, atau mengeksploitasi orang tersebut untuk praktik eksploitasi dalam segala bentuknya melalui

¹ Moh Hatta, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori dan Praktek*, Liberty, Yogyakarta, 2012. Hlm. 5.

ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau menempatkan korban pada posisi rentan, atau dengan memberikan bayaran atau keuntungan untuk mendapatkan persetujuan dari orang yang menguasai korban, merupakan tindak pidana perdagangan orang.²

Pada hakekatnya, siapa saja bisa menjadi korban kejahatan, baik perempuan, laki-laki, maupun anak-anak. Anak mengacu pada siapapun yang berusia di bawah 18 (atau delapan belas tahun), termasuk anak yang belum lahir. Karena anak masih dalam tahap belum bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah serta masih lemah baik fisik maupun mental, maka kejahatan terhadap mereka sangat rentan terjadi agar anak-anak menjadi sasaran empuk suatu kejahatan. Perlindungan anak merupakan salah satu komponen Hak Asasi Manusia (HAM). Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada manusia dan mencerminkan martabatnya. Hak-hak ini harus dilindungi oleh hukum agar mereka menjadi efektif.³

Pelacuran adalah penawaran kenikmatan seksual dengan imbalan uang tunai atau keuntungan lainnya. Oleh karena itu, prostitusi adalah seks untuk mencari nafkah, dengan sejumlah tujuan yang ingin dicapai, paling sering dalam bentuk uang. Ini tidak hanya mencakup kontak seksual tetapi

² Hafrida, Nelli Herlina, dan Zulham Adamy. *The Protection of Women and Children as Victims of Human Trafficking in Jambi Province*, *Jambe Law Journal* 1.2, 2018, hlm. 208-209. <https://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&hl=id&q=related:2IA0nHqhLMJ:scholar.google.com/>

³ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak: Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm.7

juga semua jenis aktivitas seksual dengan orang lain dengan imbalan.

Penyakit sosial lain yang perlu diberantas adalah prostitusi. Tanpa mengabaikan upaya pencegahan dan perbaikan. Kata Latin pro-stituere atau pro-stauree, yang berarti membiarkan diri melakukan perzinahan, pelacuran, percabulan, dan pemerkosaan, merupakan sumber dari kata bahasa Inggris prostitusi. Sedangkan PSK adalah pelacur atau pelacur. Disebut juga WTS atau pelacur. Jadi pelacur adalah perempuan yang melakukan perilaku yang tidak sesuai yang dapat merugikan dirinya sendiri dan orang lain yang berinteraksi dengannya serta menyebabkan kesehatan yang buruk.⁴

Prostitusi adalah kejahatan yang sudah ada sejak lama. Banyak kasus telah menjadi lebih umum dalam kehidupan sehari-hari. Tentu saja, kejahatan memiliki sasaran, dan perempuan serta anak-anak seringkali menjadi sasaran kejahatan prostitusi. Perempuan dan anak-anak perlu diberikan nasehat yang baik saat ini, serta perlindungan hukum yang menjamin perlindungan hak-hak mereka sebagai korban.

Untuk mencegah anak-anak menjadi korban langsung atau tidak langsung dari kegiatan kriminal, mereka harus dilindungi. Pelacuran anak adalah salah satunya. Karena anak-anak tidak diawasi atau dilindungi, kasus prostitusi dapat terjadi kapan saja. Perkembangan teknologi juga

⁴ Kania Mulia Utami;Ridwan; Aan Asphianto. Pembaharuan Hukum Pidana Tentang Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi Di Indonesia. *PAMPAS Journal of Criminal Law*. Vol 1 No 2, 2020. Hlm 23
<https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/9007/6393>

menjadi faktor pendorong terjadinya prostitusi.

Perlindungan hukum bagi masyarakat sangat penting dalam kaitannya dengan upaya pembelaan terhadap korban tindak pidana perdagangan manusia. Hal ini disebabkan siapa saja, baik kelompok maupun individu, sewaktu-waktu dapat menjadi korban perdagangan manusia. Dalam rangka melindungi masyarakat, perlindungan hukum bagi korban perdagangan manusia dapat dilaksanakan dengan berbagai cara.⁵

Akibat lemahnya implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang tidak membuat waspada pelaku atau mucikari/muncikari, kasus prostitusi online terhadap anak terus meningkat meski secara hukum dilarang. Anak-anak terus menjadi korban kejahatan yang melibatkan prostitusi online sebagai akibatnya.

Anak korban kekerasan seksual harus mendapat perlindungan khusus, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 juncto Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang perlindungan anak (Pasal 59 Undang-Undang 23 Tahun 2002 juncto Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014). Menggunakan pedoman yang ditetapkan dalam artikel jika membandingkan pasal lima Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mengatur tentang

⁵ Yulia Monita, *Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007*. *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 6, no. 2, 2013, hlm. 168.
<https://www.neliti.com/id/publications/43223/perlindungan-hukum-bagi-korban-tindakpidana-pedagangan-orang-dalam-perspektif#cite>

perlindungan khusus bagi anak, dengan pasal-pasal lain dalam undang-undang yang sama, jelas bahwa perlindungan khusus dalam hal ini hanya memberikan perlindungan kepada anak yang telah hak atas perlindungan dari negara dan masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Perlindungan ini berkaitan dengan anak yang menjadi korban kekerasan seksual.⁶

Berdasarkan jenis kekerasan seksual terhadap anak yang termasuk dalam tindak pidana prostitusi online terhadap anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 memberikan perlindungan khusus kepada anak korban kekerasan seksual yang terbagi dalam beberapa jenis perlindungan. Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali Wajib dan Bertanggung Jawab Menata Anak Untuk Media Sosial, sebagaimana tercantum dalam Pasal 20 UU Perlindungan Anak. Pasal 5 UU Perlindungan Anak melakukan hal yang sama.

Bisnis prostitusi anak kembali terungkap. Mirisnya, anak-anak yang diperdagangkan berumur 13-15 tahun. Sedangkan mucikarinya baru berusia 19 tahun. Jumlah korbannya mencapai 13 anak. Empat tersangka pelaku diamankan oleh Polresta dan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jambi. Mereka adalah S alias K (52) ,warga Jakarta; R (36) ,warga Kota Jambi; PIS (19), warga Kota Jambi; dan ARS (15), warga Kota Jambi.“S

⁶ Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015), hlm. 56.

merupakan pelaku utama. R dan PIS merupakan mucikari, dan ARS pelaku anak,” kata Kapolresta Jambi Kombes Pol Eko Wahyudi kepada wartawan, Senin (27/12). Kasus ini terungkap bermula dari laporan warga kehilangan anak pada 4 Desember 2021. Dari penyelidikan diketahui bahwa anak tersebut berada di Jakarta. Eko menyebutkan, anak itu dijual kepada tersangka S. “Sejauh ini ada dua laporan yang kita terima, dengan korban 13 orang, usia 13-15 tahun. Tidak tertutup kemungkinan korban bertambah,” kata Eko.

Eko menjelaskan, S awalnya berhubungan dengan dua perempuan, R dan PIH. Kemudian S meminta R dan P mencarikan anak di bawah umur yang bisa ditiduri. Setelah didapat, korban difasilitasi ke Jakarta, baik lewat jalur darat maupun jalur udara. “Korban dibayar Rp 3 juta hingga Rp 3,5 juta,” ungkap Eko. Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa S sudah melancarkan aksinya selama satu tahun belakangan. “Dari hasil pemeriksaan diketahui, korban mau dijual karena tergiur mendapatkan barang-barang dengan mudah, seperti HP dan lainnya,” tandasnya.

Selain di Polresta Jambi, kasus ini juga dilaporkan ke Polda Jambi. Sejauh ini ada dua laporan yang masuk ke Ditreskrimum Polda Jambi. “Cerita awalnya sama, kehilangan anak. Setelah kita proses, ternyata mucikari dan pelaku di Jakarta sama dengan yang diamankan Polresta Jambi,” kata Direktur Reskrimum Polda Jambi Kombes Pol Kaswandi Irwan. Selanjutnya, kata Kaswandi, penanganan kasus ini dilimpahkan ke Polresta Jambi. “Kami akan back up penyidik Polresta untuk

pengembangan,” kata Kaswandi.

Kaswandi mengatakan, awalnya pelaku utama berhubungan dengan mucikari. Kemudian dijadikan jaringan untuk mencari korban anak. "Korban dibujuk rayu dengan dijanjikan dibelikan sesuatu," tandasnya. Aktivis perlindungan anak dari Lembaga Perlindungan Anak Indonesia Kota Jambi, Meri Marwati, menyebut bahwa kasus ini sangat luar biasa karena korbannya banyak dan masih di bawah umur.

“Kita memberikan pendampingan untuk meminimalisir dampak yang dialami oleh para korban,” kata Meri. Terungkap, korban tidak hanya dari Kota Jambi. “Ada juga dari daerah pinggiran, seperti Kumpeh dan lainnya,” ujarnya. Amsarnadi dari LPAI Provinsi Jambi menyebut kasus ini melibatkan pedofilia. Pihaknya juga akan fokus pada pendampingan psikologi para korban. “Agar tidak jadi trauma berkepanjangan,” pungkasnya.⁷

Dari penyelidikan Polres Jambi, ditemukan pelaku kejahatan siber ini melakukan aktivitas seksual di Facebook, Messenger, dan jejaring sosial lainnya. Polisi sebelumnya telah mengetahui sejumlah situs (website) yang diduga menawarkan layanan prostitusi online. Para pelaku membuat profil media sosial mereka sendiri dan memposting banyak gambar wanita bersama dengan profil mereka.

⁷ <https://metrojambi.com/read/2023/02/23/68126/terungkap-prostitusi-anak-jambijakarta-korban-dijual-rp-3-juta> diakses pada Jumat, 02 Maret 2023 Pukul 01.51 WIB.

Tabel 1
Jumlah Kasus Tindak Pidana Prostitusi Anak di Wilayah Hukum
Kepolisian Resort Kota Jambi Tahun 2019-2022

Tahun	Jumlah Kasus
2019	5
2020	4
2021	2
2022	1
Jumlah	12

Sumber : *Kepolisian Resort Kota Jambi*

Jumlah kasus tindak pidana prostitusi yang melibatkan anak yang terjadi di Wilayah Hukum Polres Jambi selama empat tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di atas menurut data dari Satuan PPA dan Tipidter Kota Jambi Resor Polisi. Pada tahun 2019 terdapat 7 kasus yang merupakan kasus terbanyak yang pernah ada. Mungkin ada hingga 4 kasus di tahun 2020, 2 kasus di tahun 2021, dan terakhir 1 kasus di bulan Juni 2022.

Dalam kasus penyedia jasa prostitusi dengan menggunakan internet, Bagian PPA dan Tipidter Polres Jambi terlebih dahulu mencoba mengetahui lokasi pelaku dengan mencari detail akun media sosial mereka dan menambahkannya sebagai kontak (*add account*) dalam daftar teman. Salah satu jenis perencanaan adalah ini. Kebijakan ini dapat ditemukan dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Investigasi dengan cara menyamar (penyamaran) juga disertakan.

Anak sebagai korban prostitusi berdasarkan UU No. 23/2002 mendapat perlindungan khusus berdasarkan pasal 59 dan hal itu merupakan

kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Perlindungan khusus bagi anak sebagai korban eksploitasi seks komersial anak dilakukan melalui:

- a) Penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual.
- b) Pemantauan, pelaporan dan pemberian sanksi.
- c) Pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.

Menurut Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perlindungan khusus kepada anak sebagai korban tindak pidana dilakukan melalui:

- a) Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun diluar lembaga;
- b) Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
- b) Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
- c) Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Berdasarkan jenis kekerasan seksual terhadap anak yang termasuk dalam tindak pidana prostitusi online terhadap anak, Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 memberikan perlindungan khusus kepada anak korban kekerasan seksual yang terbagi dalam beberapa jenis perlindungan. Pasal 76 UU 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak memberikan perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana prostitusi. Dinyatakan bahwa “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, bahkan ikut serta dalam eksploitasi ekonomi dan/atau seksual terhadap anak. Ancaman hukuman maksimal bagi pelaku adalah 10 (sepuluh) tahun penjara dan denda paling banyak Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 20, “Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali wajib dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan Perlindungan Anak”. Upaya perlindungan anak harus segera dilancarkan. Misalnya, Kepolisian adalah lembaga yang bertugas memberikan perlindungan hukum. Masyarakat, selain organisasi pemerintah, terlibat penuh dalam Pasal 72 ayat (1) tentang Perlindungan Anak, “Masyarakat berperan serta dalam perlindungan anak, baik secara individu maupun kelompok”.

Berdasarkan informasi dan fakta yang disajikan di atas, jelaslah bahwa meskipun semua undang-undang Indonesia baru dibuat, belum dapat dibuktikan bahwa anak-anaknya bukan korban dari kejahatan tersebut. Hukum yang dapat diterapkan di sini harus dilihat dari sudut pandang baik

hukum materi maupun hukum bentuk. Karena ketika seorang ahli hukum melakukan kesalahan sebagai bagian dari penelitian hukum, hal ini dapat menyebabkan tumbuhnya rasa takut seseorang. Dari pertanyaan inilah yang akan menjadi fokus penelitian ini dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Prostitusi (Studi Kasus Kepolisian Resort Kota Jambi)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang penulis kemukakan di atas, maka dalam lingkup permasalahan ini penulis membatasinya agar masalah yang dibahas tidak menyimpang dari sarannya. Adapun rumusan permasalahan dari proposal skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Apa faktor penyebab anak menjadi korban tindak pidana prostitusi di Kepolisian Resort Kota Jambi?
2. Bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana prostitusi di Kepolisian Resort Kota Jambi?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dibuat di atas maka tujuan dari penelitian ini ialah:

- a. Untuk mengetahui apa faktor penyebab anak menjadi korban tindak pidana prostitusi di Kepolisian Resort Kota Jambi.

- b. Untuk mengetahui apa saja upaya dalam perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana prostitusi di Kepolisian Resort Kota Jambi.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini diantaranya adalah:

a. Manfaat Teoretis Penelitian

Kontribusi teoretis dari penelitian ini sangat berharga untuk memajukan pemahaman ilmiah di bidang hukum pidana dan harus diakui sebagai kontribusi pengetahuan. Sains terus maju dan berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemahaman kita tentang “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Prostitusi” ditinjau dari KUHP, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan peraturan lainnya, baik dari segi hukum formil maupun hukum materiil.

b. Manfaat Praktis Penelitian

Secara praktis kita bisa belajar lebih dalam dan memahami lebih dalam tentang *rule of law* dalam hukum nasional Indonesia yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap anak korban prostitusi yang posisinya masih timpang dalam hukum nasional kita, khususnya hukum pidana. Serta memberikan jawaban kepada masyarakat umum atas permasalahan hukum, khususnya yang

menyangkut anak-anak yang menjadi korban tindak pidana prostitusi. Dalam rangka meningkatkan penghormatan dan perlindungan harkat dan martabat masyarakat, khususnya perempuan dan anak di Indonesia, diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah, akademisi, praktisi, maupun lembaga swadaya masyarakat. yang prihatin dengan maraknya kejahatan terhadap korban prostitusi anak saat ini.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah struktur yang menjelaskan hubungan antara konsep-konsep tertentu yang sedang dipelajari atau diinginkan. Konsep adalah abstraksi dari fenomena, bukan gejala yang perlu dipelajari. Biasanya, fenomena itu sendiri disebut sebagai fakta. Kerangka konseptual menurut Soerjono Soekanto adalah kerangka yang menjelaskan hubungan antara konsep-konsep tertentu, yang merupakan kumpulan makna yang dihubungkan dengan istilah-istilah yang digunakan baik dalam penelitian normatif maupun empiris, diinginkan dan dipelajari.⁸ Berikut adalah penjelasan mengenai definisi atau arti judul yang telah diambil oleh peneliti agar tidak terjadi kerancuan dan multitafsir:

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia, 1989, hlm.103.

a. Perlindungan Hukum

Menurut Philipus M. Hadjon, adanya kebutuhan beberapa subjek untuk segera memperoleh beberapa sumber bagi kelangsungan subjek hukum yang dijamin dan dilindungi undang-undang merupakan suatu kondisi subjektif yang menyatakan bahwa kekuasaan diselenggarakan secara terorganisir pada saat berpolitik dan keputusan ekonomi, terutama pada distribusi sumber daya pada tingkat individu dan struktural.⁹

b. Anak

Anak didefinisikan sebagai orang dalam perkara tunggakan yang telah berumur 8 (delapan) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 pasal 1 ayat (2).¹⁰ Anak juga harus belum pernah menikah, yang merupakan syarat kedua. Ini menyiratkan tidak menikah atau menikah tetapi bercerai. Sekalipun belum genap 18 (delapan belas) tahun, seorang anak dianggap dewasa jika masih terikat secara hukum dengan perkawinan orang tuanya atau jika perkawinannya berakhir karena perceraian.

c. Korban

Orang yang menderita kerugian fisik, mental, dan/atau finansial akibat tindak pidana dianggap sebagai korban, sebagaimana dimaksud

⁹ Abintoro Prakoso, *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Grafika, Yogyakarta: Laksabang, 2013, hlm.14.

¹⁰ UU No.3 tahun 1997, Tentang Peradilan Anak, Tercantum Dalam Pasal 1 ayat (2).

dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

d. Tindak Pidana

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), istilah “kejahatan” disebut dengan “*strafbarfeit*” oleh pembuat undang-undang. *Strafbar* adalah kata Belanda untuk dihukum, dan *feit* adalah kata untuk fakta atau fakta. Menurut Simons, perbuatan (penanganan) yang patut dipidana adalah perbuatan yang melanggar hukum, berkaitan dengan kekeliruan, dan dilakukan oleh orang-orang yang mampu memikul tanggung jawab. Menurut Bambang Poernomo, sudah ada tindak pidana, khususnya yang dilakukan oleh orang melakukan kejahatan atau tindak pidana yang membahayakan kepentingan orang lain atau kepentingan umum.¹¹

e. Prostitusi

Kata-kata dengan makna dapat ditemukan dalam frasa "prostitusi". Prostitusi, atau hanya pelacuran, berasal dari bahasa Latin *prosituare*, yang berarti menjauhkan diri dari percabulan atau perzinahan. Ini dikenal sebagai prostitusi dalam bahasa Inggris, yang merupakan istilah tidak bermoral. Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa kata “pelacur” yang berarti “sial, celaka, sial,

¹¹ Topo Santoso, *Seksualitas dan Hukum Pidana*, IND-HILL-CO, Jakarta, 1997, hlm.67.

gagal, atau berperilaku buruk” adalah asal kata “pelacuran”. Menjual diri untuk memuaskan nafsu adalah inti dari prostitusi.

E. Landasan Teoretis

Dalam melakukan penelitian, khususnya penelitian hukum. Agar penelitian menjadi lebih bernilai ilmiah dan diperhitungkan secara akademis, diperlukan sejumlah teori yang dirancang untuk mendukung data dan argumen. Penulis dalam penelitian ini menggunakan beberapa teori yang sering digunakan dalam kajian topik perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana prostitusi. Penulis mencantumkan sejumlah teori untuk mendukung penelitian ini, antara lain:

a. Teori Perlindungan Korban Kejahatan

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, “Korban adalah setiap orang yang mengalami kerugian fisik, mental, dan/atau ekonomi yang diakibatkan oleh tindak pidana”, menurut Pasal 1 angka 2. Siapa yang menjadi korban tindak pidana. Berikut ini, antara lain yang dapat didaftarkan sebagai korban tindak pidana:

- a) Korban langsung adalah mereka yang mengalami dan merasakan secara langsung pedihnya suatu kejahatan. Individu atau sekelompok individu yang mengalami kerugian jasmani dan rohani, seperti luka fisik, luka ringan, atau kehilangan penghasilan, merupakan korban langsung dari kasus tersebut. Hak asasi manusia

yang mendasar ditekan sebagai akibat dari tindakan atau kelalaian yang melanggar hukum atau penyalahgunaan wewenang.

- b) Korban tidak langsung adalah mereka yang menjadi korban karena orang lain membantu korban langsung, membantu menghentikan korban langsung menjadi korban, atau membantu mereka yang bergantung pada korban langsung untuk kelangsungan hidupnya. Contoh kejahatan yang tidak menimbulkan korban adalah perzinahan, pornografi, perjudian, penggunaan narkoba, dan situasi lainnya.

b. Teori Penegakan Hukum

Landasan teoretis dari teori penegakan hukum yang memandangnya sebagai tanggung jawab bersama seluruh kekuatan bangsa, termasuk Indonesia, adalah tanggung jawab bangsa secara keseluruhan. Bangsa Indonesia menghadapi masalah serius dengan penegakan hukum. Tujuan penegakan hukum adalah mewujudkan konsep keadilan, kepastian hukum, dan kemaslahatan sosial. Oleh karena itu, penegakan hukum pada hakekatnya merupakan metode perwujudan gagasan. Menurut Lawrence M. Friedman, ada tiga bagian hukum dan sistem hukum, yang meliputi sebagai berikut:¹²

- 1) Konten, atau semua peraturan, standar, dan prinsip hukum tertulis dan tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan.

¹² CSA Teddy Lesmana, SH, MH., Nusa Putra University, *Pokok-Pokok Pikiran Lawrence Meir Friedman; Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial* <https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu-sosial/> diakses pada tanggal 15 Desember 2022 Pukul 15.20.

- 2) Struktur, yang mengacu pada semua badan peradilan yang beroperasi saat ini dan infrastruktur pendukungnya, antara lain antara kepolisian dan kepolisian, Kejaksaan dan Kejaksaan, pengadilan dan hakim.
- 3) Budaya/pendapat hukum, meliputi sikap, kebiasaan, cara berpikir dan berperilaku di kalangan warga negara dan penegak hukum masyarakat, tentang hukum dan berbagai fenomena hukum.

Menurut Lawrence M. Friedman, peran aparat penegak hukum dikategorikan sebagai struktur hukum dalam sistem hukum dalam buku ini. Karena tidak akan ada struktur hukum tanpa penegakan hukum, maka hukum hanya akan menjadi hukum kematian. Manusia selalu terlibat dalam penegakan hukum. Supremasi hukum tidak bisa berdiri sendiri. Kehendak hukum sebenarnya dilakukan oleh orang-orang. Aparat penegak hukum memainkan peran yang sangat signifikan dalam masyarakat. Tangan penegak hukum akan mewujudkan semua yang dijanjikan hukum. Keadilan yang menjadi tujuan pembentukan hukum dilaksanakan secara konsisten oleh aparat penegak hukum untuk menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat, dan keadilan merupakan hal yang mendasar bagi penegakan hukum.

Keadilan yang menjadi tujuan pembentukan hukum dilaksanakan secara konsisten oleh aparat penegak hukum untuk menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat, dan keadilan merupakan hal yang mendasar bagi penegakan hukum. Penegakan

hukum kemudian mengacu pada proses menempatkan hukum ini ke dalam tindakan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 64 Ayat (3), yang pada intinya merangkum seluruh upaya pemerintah untuk melindungi anak yang menjadi korban tindak pidana, antara lain:

- a) Intervensi untuk rehabilitasi baik di dalam maupun di luar institusi;
- b) Kampanye media untuk mencegah pelabelan dan melindungi identitas;
- c) Memberikan jaminan keamanan fisik, mental, dan sosial bagi saksi korban dan saksi ahli;
- d) Memberi orang akses ke informasi tentang perkembangan kasus.

Mengingat anak merupakan salah satu sumber daya yang sangat penting bagi pembangunan suatu negara di masa depan, maka upaya perlindungan anak harus terus diupayakan untuk menjaga kesejahteraannya. Karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum, maka standar perlindungan anak harus sama dengan standar perlindungan orang dewasa.

Prinsip dasar perlindungan anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 2 yang menyatakan bahwa perlindungan anak dilaksanakan sesuai dengan Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945. Prinsip-prinsip perlindungan anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 antara lain:

- a) Nondiskriminasi;
- b) Kepentingan terbaik anak;
- c) Hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang;
- d) Menghormati sudut pandang anak-anak.

F. Orisinilitas Penelitian

Dalam penulisan karya tulis ini, penulis menyatakan bahwa penulisan karya tulis ini merupakan hasil karya tulis dari penulis sendiri, bukan merupakan hasil karya tulis orang lain. Dalam penulisan karya tulis ini, penulis akan memberikan perbandingan dari hasil karya tulis terdahulu yang memiliki kemiripan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis sebagai berikut:

1. Judul PENANGANAN PROSTITUSI ANAK OLEH PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN, Fajar Nur Efendi, 10410584, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Rumusan Masalah adalah Bagaimana upaya Pemerintah Kabupaten Sleman dalam menangani prostitusi anak di Sleman? dan Faktor apa yang menjadi pendukung dan penghambat dalam upaya menangani prostitusi anak di Sleman?

Tujuan Penelitiannya adalah Untuk mengetahui upaya Pemerintah Kabupaten Sleman dalam menangani prostitusi anak di Sleman dan

untuk mengetahui upaya faktor apa yang menjadi pendukung dan penghambat dalam upaya menangani prostitusi anak di Sleman.

Hasil Penelitiannya adalah Anak adalah aset utama bagi orang tua anak tersebut, anak juga merupakan aset bangsa Indonesia agar tetap dapat kokoh menghadapi seluruh permasalahan yang akan datang. Permasalahan yang dihadapi di Kabupaten Sleman yang berkaitan dengan anak saat ini adalah prostitusi anak. Pemerintah Kabupaten Sleman menggunakan metode preventif dan represif dalam penanganan prostitusi anak di Sleman melalui aparaturnya. Dalam metode preventif, pemerintah beserta pihak terkait melakukan tindakan yang berupa pencegahan dengan berbagai metode agar tidak terjadi tindakan prostitusi anak. Sedangkan dalam upaya represif adalah dengan menindak dengan metode tertentu antara lain penindakan pidana, rehabilitasi, resosialisasi apabila terjadi tindakan prostitusi anak. Prostitusi anak adalah anak yang sebenarnya harus mendapatkan bimbingan dan pengawasan secara menyeluruh, pengawasan dan ini bukan dalam bentuk kontrol ketat dalam setiap tindakannya, namun dengan perhatian seluruh orang dewasa disekelilingnya berawal dari lingkup keluarga, lingkungan terdekat juga terjauh rumah anak tersebut tinggal, tempat bermain, termasuk sekolah dukungan dan pengertian seperti tersebut dapat menjadi pendukung Pemerintah Kabupaten Sleman dalam menangani prostitusi anak tersebut. Sedangkan penghambatnya adalah tidak terpenuhinya atau kurang personil dalam

menanggulangi prostitusi tersebut dan prostitusi anak ini di Kabupaten Sleman semakin canggih dengan didukung teknologi maju.

2. Judul “SANKSI PIDANA TERHADAP PARA PELAKU DALAM KASUS PELACURAN ANAK PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF”, S Rio Krisno Pambudi, 152131035, Institusi Agama Islam Negeri Surakarta.

Rumusan masalahnya adalah Bagaimana sanksi pidana yang diberikan terhadap para pelaku dalam kasus pelacuran anak di bawah umur, menurut hukum Islam dan hukum positif? dan Bagaimanakah perbandingan hukum antara Hukum Islam dan Hukum Positif mengenai sanksi pidana bagi Mucikari dan Pengguna Jasa Pelacuran Anak?

Tujuan penelitiannya adalah Untuk mendeskripsikan bentuk sanksi pidana pelaku tindak pidana Pelacuran dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif dan Untuk menganalisis saksi hukuman kemudian membandingkan antara Hukum Islam dan Hukum Positif mengenai sanksi pidanabagi Mucikari dan Pengguna Jasa Pelacuran Anak.

Hasil penelitiannya adalah Pasal 296 dan 506 KUHP terdapat sanksi bagi pelacuran anak terutama terhadap pelaku mucikari dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda serta dalam Pasal 284 menjelaskan bahwa pelaku prostitusi atau perzinahan antara salah satu atau dari keduanya telah menikah maka dikenai sanksi pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda. Namun

dalam pasal 284 termasuk delik aduan, yaitu jika salah satu atau dari kedua belah pihak melapor ke pihak yang berwajib maka sanksi pidana bias diberikan, jika sebaliknya maka tidak bias dipidanakan. UUPTPO Pasal 2 angka 1 dan 2 memberikan sanksi pidana kepada traffickers yaitu hukuman penjara selama 3-15 tahun dan denda maksimum sebesar Rp. 120.000.000 sampai 600.000.000. Dalam UUTPPO pasal 12 menyebutkan bahwa setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana penjara 5 (lima) tahun sampai dengan seumur hidup dan denda sebesar Rp. 200.000.000 sampai dengan Rp 5.000.000.000. Pelacuran Anak menurut hukum pidana Islam belum ada dalam Alquran dan Hadist, namun untuk tidakan preventifnya terdapat dalam Al Quran QS Al-Isra' ayat 32. Tindak pidana perzinahan sendiri sudah ada dalam Al Quran dan Hadist sesuai dengan status pelaku, yaitu zina muhshan atau zina keduanya sudah menikah atau pernah menikah maka hukumannya sesuai dengan hadist yang diriwayatkan oleh Umar bin Khaththab yaitu dirajam atau dilempari batu sampai mati dihadapan kalayak ramai. Zina ghairumuhshan yaitu zina yang keduanya belum pernah menikah,

maka hukumannya sesuai dengan QS An-Nur ayat 2 dan hadis nabi yaitu didera seratus kali dan diasingkan selama satu tahun. Dalam hukum Islam semua pelaku dapat dikenai pidana. Pelaku mucikari dapat dikenai jarimah ta'zir, dan pelaku PSK maupun Pengguna jasa dapat dikenai jarimah zina. Persamaan dan perbedaan dalam pemberian sanksi terhadap pelaku prostitusi menurut hukum pidana Islam dan hukum positif dari segi sanksinya yaitu sama-sama memberikan sanksi pidana terhadap pelaku pelacura anak. Perbedaannya adalah hukum pidana Islam menjerat semua pelaku pelacuran kecuali anak sebagai pelaku dalam hukum pidana positif masih ada kekosongan hukum dalam memberikan sanksi terhadap pelaku zina sesuai dengan pasal 296 KUHP yaitu salah satu atau dari keduanya telah menikah maka dikenai sanksi pidana, dan sebaliknya jika belum maka tidak bias dikenai sanksi pidana. Sifat dalam Pasal 296 KUHP tersebut yaitu termasuk delik aduan yaitu jika salah satu atau dari kedua belah pihak melapor kepihak yang berwajib maka sanksi pidana bias diberikan, jika sebaliknya maka tidak bisa dipidanakan.

3. Judul "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK", Nanda Dewi Ema, B11112030, Universitas Hasanuddin Makassar.

Rumusan masalahnya adalah Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana perdagangan anak dalam Putusan Nomor 1404/Pid.B/2013/PN.Mks? dan Bagaimanakah

pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada tindak pidana perdagangan anak dalam Putusan Nomor 1404/Pid.B/2013/PN.Mks Tujuan penelitiannya adalah Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana perdagangan anak berdasarkan Putusan Nomor 1404/Pid.B/2013/PN.Mks dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada tindak pidana perdagangan anak dalam Putusan Nomor 1404/Pid.B/2013/PN.Mks.

Hasil penelitiannya adalah Penerapan hukum pidana pidana materiil oleh Jaksa Penuntut Umum sudah tepat karena penulis berpendapat bahwa unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang terbukti yaitu :

- a. Unsur setiap orang;
- b. Unsur "yang melakukan perekrutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan uang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia": Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam Putusan No. 1404/Pid.B/2013/PN.Mks. Menurut penulis sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam

Pasal 183 KUHAP yakni hakim dalam menjatuhkan pidana sekurang-kurangnya berdasarkan dua alat bukti dan keyakinan bahwa suatu tindak pidana itu benar terjadi, dan alat bukti dalam kasus ini adalah berupa keterangan saksi dan keterangan terdakwa sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa Irma Hariani melakukan tindak pidana perdagangan orang tersebut. Serta dengan melihat pertimbangan hakim baik yang meringankan maupun yang memberatkan terdakwa.

Berdasarkan ketiga skripsi tersebut maka terdapat perbedaan sebagai berikut:

1. Skripsi yang berjudul “PENANGANAN PROSTITUSI ANAK OLEH PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN” yang ditulis oleh Fajar Nur Efendi lebih menekankan pada penanganan dari pemerintah kabupaten Sleman dalam menindak tindak pidana anak yang terjadi di Kabupaten Sleman. Selain itu penulis juga membahas tentang apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat pemerintah kabupaten Sleman dalam menangani prostitusi anak di wilayah kabupaten Sleman.
2. Skripsi yang berjudul “SANKSI PIDANA TERHADAP PARA PELAKU DALAM KASUS PELACURAN ANAK PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF” yang ditulis oleh S Rio Krisno pambudi menekankan pada sanksi pidana dalam

perspektif hukum pidana islam dan hukum positif terhadap pelaku pelacuran anak.

3. Skripsi yang ditulis oleh Nanda Dewi Ema yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK”, menekankan permasalahan pada penerapan hukum pidana materil dalam Putusan Nomor 1404/Pid.B/2013/PN.Mks terhadap pelaku tindak pidana perdagangan anak dan Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada tindak pidana perdagangan anak dalam Putusan Nomor 1404/Pid.B/2013/PN.Mks.

Sehubungan dengan ketiga penelitian terdahulu, dalam penulisan skripsi yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PROSTITUSI (STUDI KASUS KEPOLISIAN RESORT KOTA JAMBI)” penulis akan menekankan pada dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak sebagai korban prostitusi. Skripsi yang akan penulis susun membahas tentang penegakan hukum terhadap prostitusi yang terjadi terhadap anak dibawah umur, sehingga dalam penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mendapatkan data apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus prostitusi yang terjadi terhadap anak, mengetahui mengapa prostitusi yang terjadi terhadap anak mengakibatkan anak sebagai korban prostitusi meskipun anak tersebut merupakan pelaku dalam praktek prostitusi, dan mengetahui bagaimana

cara dan upaya yang dilakukan oleh kepolisian dalam menindak praktek prostitusi yang terjadi terhadap anak. Dengan demikian, penulis menegaskan bahwa penelitian yang akan penulis lakukan untuk menyusun skripsi memang memiliki persamaan dengan penulisan skripsi terdahulu terkait topik penelitian, tetapi dilihat dari permasalahannya penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu, sehingga penulisan skripsi ini merupakan hasil dari gagasan dan penelitian dari penulis sendiri.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah proses mental yang disengaja yang melibatkan pencarian, pencatatan, perumusan, dan analisis informasi untuk membuat laporan. Penelitian ini menggunakan teknik kualitatif. Penelitian kualitatif didefinisikan sebagai penelitian yang menghasilkan informasi deskriptif tentang kata-kata yang diucapkan dan ditulis serta perilaku yang dapat diamati dari subjek.¹³ Pendekatan kualitatif dapat memberikan gambaran yang lebih menyeluruh, tepat, dan akurat. Informan menyediakan data untuk dianalisis.¹⁴ Penelitian ini dilakukan secara mendalam, peneliti berpartisipasi turun ke lapangan, secara bertahap mencatat apa yang terjadi di sana, dan menganalisis berbagai dokumen yang ditemukan di sana.

¹³ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2003, hlm.1

¹⁴ Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm.166

1. Tipe Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis (empiris), suatu jenis penelitian hukum sosiologis yang juga dapat disebut sebagai penelitian lapangan, untuk mendukung penelitiannya. Metode ini mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi di masyarakat.¹⁵ Penelitian hukum yang mengumpulkan informasi dari sumber primer atau informasi yang langsung dari masyarakat.¹⁶ Penggunaan undang-undang dan peraturan penegakan hukum oleh Kepolisian Resor Kota Jambi serta literatur lain yang berkaitan dengan masalah ini diteliti oleh penulis untuk penelitian ini. Polres Jambi dipilih sebagai lokasi untuk mengusut bagaimana hukum melindungi anak korban prostitusi.

2. Sifat Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran secara menyeluruh, menyeluruh, dan sistematis tentang objek yang akan diteliti. Penelitian ini bersifat deskriptif, artinya memberikan data tentang suatu kondisi atau fenomena sosial yang ada di lapangan atau yang sedang berkembang di tengah-tengah masyarakat.¹⁷

¹⁵ Suerjono Soekarto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1993, hlm. 51.

¹⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983, hlm. 24.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 2012, hlm.50

3. Jenis dan Sumber Data

a) Jenis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data primer dan data sekunder, sebagaimana diuraikan di bawah ini:

- 1) Data primer adalah informasi yang peneliti kumpulkan langsung dari sumber dan proses awal.¹⁸ Data diperoleh secara langsung melalui pembicaraan dengan narasumber secara khusus Untuk mengumpulkan informasi tentang masalah yang sedang diselidiki, polisi bekerja sebagai penyidik anak di Polresta Jambi. Informasi tersebut dikumpulkan melalui wawancara dengan responden yang diawali dengan pembuatan daftar pertanyaan dan diakhiri dengan pencatatan hasil wawancara.
- 2) Data sekunder adalah informasi yang telah dikumpulkan dari catatan resmi, buku-buku yang berkaitan dengan subjek penelitian, laporan, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.¹⁹ Penelitian ini menggunakan data sekunder berikut:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang dalam hal ini berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan pelaksanaan penyidikan terhadap anak korban tindak pidana prostitusi merupakan bahan hukum yang mengikat semua pihak.

¹⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hlm.31.

¹⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm 106.

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002.
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002.
3. UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, yang bertujuan untuk memberantas tindak pidana perdagangan orang.
5. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik No. 11 Tahun 2008.
6. Keputusan Komisi Perlindungan Anak (Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 77 Tahun 2007).

b) Bahan Hukum Sekunder

Informasi hukum ini membantu dalam menganalisis dan memahami informasi hukum primer karena terkait erat dengannya. Dokumen hukum yang menjelaskan dokumen hukum primer dikenal sebagai dokumen hukum sekunder.

1. Buku teks yang mencakup satu atau lebih topik hukum, seperti tesis, disertasi, dan tesis hukum.
2. kamus hukum.
3. Jurnal hukum.
4. Keterangan atau putusan hakim.

c) Bahan Hukum Tersier

Sumber hukum tersier, seperti kamus dan perangkat internet yang membantu penulis melakukan penelitian, merupakan sumber hukum yang menawarkan informasi tentang sumber hukum primer dan sekunder.²⁰ Kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan ensiklopedi adalah contoh bahan hukum tersier.

b) Sumber Data

Data untuk penelitian ini berasal dari sumber-sumber berikut:

a) Penelitian di Perpustakaan (*Library Research*)

Informasi tersebut dikumpulkan melalui penelitian terhadap buku-buku hukum dan undang-undang yang ditemukan di perpustakaan yang relevan dengan penelitian. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Jambi dan Universitas Jambi menjadi tempat penelitian ini dilakukan.

b) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Data dikumpulkan melalui penelitian langsung di lokasi. Polres Jambi Kota dipilih sebagai lokasi untuk melakukan kajian.

4. Teknik Pengumpulan Data

a) Studi Dokumen

Setiap penelitian hukum, termasuk penelitian normatif dan sosiologis, harus dimulai dengan studi dokumen. Untuk bahan

²⁰ Amiruddin dan Zainal Askin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja GrafindoPersada, Jakarta, 2003, hlm.30.

kajian tersebut seperti jurnal, dokumen, dan artikel yang dapat mendukung topik yang dibahas juga tersedia.²¹

b) Wawancara

Data dikumpulkan melalui sesi tanya jawab verbal dengan responden saat wawancara. Untuk menemukan permasalahan yang lebih terbuka dimana pihak yang diundang wawancara dimintai pendapat dan idenya, maka wawancara ini dilakukan dengan format semi terstruktur, antara lain mengajukan pertanyaan tambahan yang tidak ada dalam daftar pertanyaan kemudian menambahkan pertanyaan tambahan. pertanyaan yang tidak ada dalam daftar pertanyaan. -pendapat bahwa implementasi aktual lebih fleksibel daripada wawancara formal. Daftar pertanyaan disiapkan sebelum wawancara.²²

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Baik data dari penelitian lapangan (*Field Research*) maupun data dari penelitian kepustakaan (*Library Research*) akan disusun secara sistematis setelah dikumpulkan. dikumpulkan. Mendapatkan kepastian bahwa data tersebut akurat dan dapat dipertanggungjawabkan adalah tujuan lain dari penyuntingan.

²¹ Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta: hlm. 50.

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2006, hlm.262.

b. Analisis Data

Setelah mengumpulkan semua data, kemudian dianalisis secara kualitatif. Untuk memperoleh data yang tersusun secara sistematis dalam bentuk kalimat dan digunakan untuk menarik kesimpulan, analisis kualitatif menghubungkan masalah yang ditemukan dengan teori yang ditemukan dengan teori yang bersangkutan. Meskipun tidak ada rumus yang dapat digunakan untuk membuat hipotesis, analisis data adalah proses untuk mengidentifikasi tema dan melakukannya. Hanya itu pengayaan dan kedalaman analisis data tema dan hipotesis.²³

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang akan dimuat akan kami kategorikan dengan memperhatikan kaidah penulisan skripsi berikut ini guna meningkatkan pemahaman kita terhadap seluruh materi yang ditulis dalam skripsi ini:

BAB I Bab ini memberikan gambaran tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka pemikiran, landasan teori, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan. Bab selanjutnya dibangun di atas fondasi yang satu ini.

²³ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka cipta, Jakarta, 2010, hlm.66.

- BAB II** Tinjauan umum tentang Kejahatan, Prostitusi, dan Perlindungan Anak yang ditulis berdasarkan bahan hukum dan dijadikan sebagai sumber literature.
- BAB III** Bab ini Merupakan objek utama pembahasan yang memfokuskan diri pada bagaimana kualifikasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Prostitusi sebagai tindak pidana yang diatur dalam hukum positif Indonesia, pengaturan pemenuhan hak dan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana prostitusi saat ini, dan pengaturan kejahatan terhadap anak korban tindak pidana prostitusi terhadap pembaharuan hukum pidana Di Indonesia.
- BAB IV** Penutup, dalam bab ini berisikan kesimpulan dari uraian bab pembahasan dan berisikan saran yang berkenaan dengan permasalahan yang ada.